

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional sebagai salah satu perencanaan pemerintah baik pada pusat maupun daerah dalam mewujudkan tujuan Negara. Pembangunan disini diarahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, dan kepribadian dari warga Negara. Menurut Inisnu (2016) pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (dikutip: <http://noncw.blogspot.co.id>). Maka dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan bentuk usaha dari pemerintah atas perubahan dan pertumbuhan yang secara terencana melalui keputusan-keputusan menuju pembinaan dan penataan secara keseluruhan pada suatu negara.

Pembangunan secara menyeluruh disegala sektor akan dapat mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2004 mendefinisikan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dengan sebuah sistem perencanaan akan menjamin

tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, kesejahteraan, dan berkelanjutan.

Tujuan dan fungsi pembangunan perlu didasari oleh keadilan, kesejahteraan, kejujuran, loyalitas, dan kebijakan yang berpihak. Dalam proses pembangunan perlu adanya rasa tanggungjawab pemerintah atas keberlangsungan pembangunan yang efektif dan efisien. Pembangunan yang terdesentralisasi pada pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola segala potensi sumberdaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat meliputi mobilisasi keadaan sosial, ekonomi, politik, serta budaya dalam kegiatan individu maupun kelompok. Hal itu telah tercantum pada UUD 1945 pasal 33 ayat 4 yang isinya menjelaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan landasan tersebut kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah kewajiban pemerintah.

Dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melalui suatu keputusan untuk melakukan tindakan secara terencana dan sistematis bagaimana kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima demi kemakmuran rakyat. Menurut Anderson dalam Islamy (2001:17) menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang maupun sekelompok dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan dapat diwujudkan melalui suatu

pembangunan yang didasarkan pada sebuah peraturan atau keputusan dari pemerintah sebagai landasan hukum, salah satunya kebijakan dalam hal segi perekonomian.

Dalam sebuah kebijakan ekonomi diharapkan menciptakan perubahan dalam segi perekonomian dalam kaitannya dengan pembangunan di sektor ekonomi. Sektor perekonomian melalui pembangunan dapat meningkatkan dan memperbaiki pendapatan daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah pembangunan ekonomi adalah wadah kegiatan perekonomian. Jika wadah kegiatan perekonomian layak dijadikan sarana berkegiatan, proses kegiatan perekonomian akan efektif dan efisien. Salah satu wadah kegiatan ekonomi adalah pasar. Pasar merupakan tempat transaksi jual-beli antara pelaku ekonomi.

Salah satu pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan sektor ekonomi melalui pembangunan pasar. Pembangunan pasar dilakukan pemerintah sebagai sarana memperbaiki akses, fasilitas, dan kenyamanan pelaku pasar pada saat berkegiatan. Pembangunan pada pasar dilakukan melalui revitalisasi dan rehabilitasi pada pasar. Pemerintah dalam aplikasinya melakukan revitalisasi struktur fisik dan non-fisik bangunan. Pentingnya pembangunan dari sektor ekonomi melalui pasar sebab, pasar merupakan pendorong kegiatan ekonomi pada suatu daerah..

Menurut jenisnya pasar dapat dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Di dalam Peraturan Pemerintah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyewaan Fasilitas Umum, menyebutkan pengertian pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi yang di

dalamnya terdapat proses jual beli terbentuk melalui tawar-menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh pemerintah dengan tempat usaha toko, kios, bedak, los, dan tenda serta halamannya dimiliki dan dikelola atas Hak Pemakaian Pasar. Dalam pengembangan sektor perekonomian suatu wilayah diperlukan pasar yang dapat menjadi wadah dalam sirkulasi perekonomian di daerah tersebut. Salah satu aspek yang sangat penting adalah adanya pembangunan pasar. Pembangunan pasar bisa menjadi sebuah tolok ukur bagaimana perkembangan perekonomian di wilayah tersebut. Dengan adanya pembangunan pasar yang baik dan tertata akan mengkorelasi dengan input berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pasar.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan pasar semakin pesat, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Indonesia sebagai negara berkembang memang perlu adanya sebuah pembangunan ke arah lebih baik untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan masyarakat menikmati dengan baik sarana dan prasarana negara ini. Selanjutnya dalam pembinaan dan penataan sebuah pasar perlu adanya sebuah pembangunan khususnya pada pasar tradisional atau pasar rakyat. Sebab, dengan jumlah ritel persaingan pasar modern dengan pasar tradisional pada tingkat yang tinggi. Keberadaan pasar tradisional mulai tergeser dengan adanya pasar atau toko modern. Akan tetapi, apabila tidak dikondisikan dalam arahan pembinaan dan penataan maka pasar modern akan menguasai perekonomian dan terjadilah kapitalisme pemilik terhadap pasar.

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya menjadi suatu bagian yang vital di daerah tersebut sedang

mengalami kemunduran. Dalam prosesnya revitalisasi aspek yang menjadi cakupan adalah aspek fisik, aspek ekonomi, aspek budaya dan aspek sosial. Krisnamurti, 2006:5 mengungkapkan revitalisasi memiliki tiga pilar pengertian mendasar, yaitu:

“Pertama, sebagai kesadaran akan pentingnya dalam arti vitalnya bagi kehidupan bangsa dan rakyat; kedua, sebagai bentuk rumusan masa depan akan kondisi pertanian; serta ketiga, sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan proses revitalisasi”

Berkaitan dengan pernyataan diatas maka, dalam proses kegiatan revitalisasi perlu adanya kesadaran akan kehidupan masyarakat yang terkait dengan revitalisasi tersebut, perlu adanya maksud dan tujuan dilakukan kegiatan revitalisasi (5W,1H), dan dasar hukum dan strategi jangka panjang dalam proses revitalisasi.

Dalam sebuah pembangunan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan atas ketepatan mencapai mobilitas masyarakat perlu adanya kolektifitas antar *stake holder* saat menjalankan kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan perlu melihat aspek sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Dalam proses revitalisasi tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pasal 18 menyatakan bahwa proses revitalisasi pasar aspek-aspek tersebut diperlukan. Misalnya, aspek sosial-budaya memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan serta melindungi tradisi pasar tradisional itu sendiri. Aspek politik dimaksudkan untuk menjaga stabilitas roda perekonomian dan melindungi produk daerah dengan memberikan kenyamanan melalui pembangunan pasar. Sedangkan aspek ekonomi dimaksudkan untuk menambah pendapatan

perkapita masyarakat dan daerah. Dengan hal tersebut memberikan kejelasan kepada seluruh aktor pembangunan bagaimana dalam menjaga proses berdagang dan iklim yang baik agar daya saing produk daerah beserta pedagang dalam mendapatkan hasil yang layak.

Pertumbuhan pasar modern dibanding pasar tradisional mengalami kemajuan yang pesat. Menurut Krisnamurthi selaku Wakil Menteri Perdagangan Tahun 2012 menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar modern mengalami peningkatan 31,4 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pasar tradisional yang mencatatkan angka minus 8,1 persen ([finance.detik.com](http://finance.detik.com)). Sejalan dengan keadaan tersebut, Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) menyatakan bahwa pertumbuhan dari atas pasar modern telah mencapai 36.000 gerai di seluruh Indonesia. Dengan keadaan tersebut sangat dikhawatirkan pertumbuhan pasar modern dapat menggoyahkan eksistensi keberadaan pasar tradisional.

Permasalahan mengenai pertumbuhan pasar modern tidak langsung memberi dampak sepiunya pengunjung pasar tradisional, akan tetapi faktor lain juga memengaruhi, misalnya kurang terawatnya fasilitas pada pasar tradisional mengakibatkan masyarakat lebih memilih pasar modern. Permasalahan yang terjadi di pasar tradisional perlu ada tindakan serius dari pemerintah serta instansi terkait untuk mengoptimalkan kembali fungsi dan peran pasar bagi masyarakat. Secara umum, permasalahan pasar tradisional meliputi masalah logistik dimana stabilitas dan disparitas harga, rantai pasok melalui pasar, jaringan saran distribusi, dan aksesibilitas serta infrastruktur yang belum memadai (<https://ipotnews.com>). Dalam perencanaan pembangunan pasar peercontohan perlu didorong dengan peraturan-

peraturan yang jelas, sehingga pihak swasta juga memiliki pandangan dalam keikutsertaan untuk pengembangan sebuah pasar. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 atas perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dengan adanya peraturan tersebut membatasi adanya ketimpangan antara pasar tradisional atau pasar rakyat dengan pasar modern atau toko modern.

Salah satu strategi mengatasi permasalahan di atas adalah dengan diadakannya kebijakan revitalisasi pasar. Dalam revitalisasi pasar tentunya mempunyai permasalahan yang perlu ditangani serta memberikan kenampakan baru fisik dan *non*-fisik pasar tradisional itu sendiri. Permasalahan yang muncul pada setiap pasar tradisional umumnya sama, yaitu penataan yang kurang jelas dan semrawut, akses pembeli yang susah, kebersihan, dan lain-lain. Akibatnya pasar tradisional yang tidak dapat bertahan dan sepi, serta pelayanan tidak didistribusikan secara optimal. Misalnya kasus pasar tradisional Pon Kota Blitar, pedagang banyak yang melakukan kegiatan jual-beli di sepanjang trotoar depan pasar, hal tersebut dilakukan agar mudah dijangkau oleh pembeli. Maka dengan hal tersebut, fungsi trotoar teralihkan, macet, sampah, dan daya beli masyarakat untuk belanja di pasar tersebut berkurang.

Tujuan Pemerintah Kota Blitar melakukan revitalisasi pada pasar tradisional di Kota Blitar adalah sebagai usaha Pemerintah Kota Blitar untuk keberlanjutan efektifitas pasar rakyat yang harus segera di modernisasi dan dikembangkan menjadi wisata rakyat dan sebagai usaha pemberdayaan pedagang pasar demi meningkatnya

kesejahteraan dan pendapatan. Dengan fenomena pertumbuhan pasar modern di Kota Blitar pemerintah daerah bergerak aktif untuk menyelamatkan eksistensi pasar tradisional. Di Kota Blitar terdapat beberapa pasar tradisional yang sudah direncanakan untuk direvitalisasi, yaitu:

Tabel 1. Data Sarana dan Prasarana Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar

| No. | Pasar               | Volume                | Keterangan                |
|-----|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.  | Pasar Legi          | 17.883 M <sup>2</sup> |                           |
| 2.  | Pasar Templek       | 3.000 M <sup>2</sup>  | Penggunaan Jl. Kacapiring |
| 3.  | Pasar Dimoro        | 18.935 M <sup>2</sup> |                           |
| 4.  | Pasar Pon           | 900 M <sup>2</sup>    |                           |
| 5.  | Pasar Wage          | 1.497 M <sup>2</sup>  |                           |
| 6.  | Pasar Bungur        | 756 M <sup>2</sup>    | Sewa Tanah PT. KAI        |
| 7.  | Pasar Pahing        | 600 M <sup>2</sup>    |                           |
| 8.  | Pasar Loak          | 600 M <sup>2</sup>    |                           |
| 9.  | Pasar Karang Tengah | 300 M <sup>2</sup>    |                           |

Sumber : ppid.blitarkota.go.id

Dalam komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam ikutserta mewujudkan program 5.000 pasar sesuai janji Nawacita yang pelaksanaannya dalam kurun lima tahun mendatang. Hal tersebut telah diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar dengan program Pro Rakyat jilid I dan II.



Dalam mengatasi masalah-masalah pada Pasar Tradisional Pon Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar melakukan pembangunan dan pengembangan ruang kota. Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikatif Kota Blitar Tahun 2011. Dalam proses pembangunan jangka menengah tersebut pada saat ini hasilnya dapat dilihat bagaimana Pemerintah Kota Blitar telah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam pembangunan pasar tradisional Pemerintah Kota Blitar juga menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kota Blitar. Dengan adanya peraturan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam mengawasi kegiatan pasar-pasar tradisional di Kota Blitar. Selain aspek di atas, terdapat satu alasan dimana pembangunan pasar tradisional Kota Blitar adalah langkah menuju suatu modernisasi pengelolaan pasar tradisional agar dapat menyaingi keberadaan pasar modern dan telah dipilih menjadi kebijakan strategis Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016. Revitalisasi pasar tradisional dinilai sangat strategis untuk pembangunan tata ruang perkotaan dan serta meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah persaingan ritel pasar modern dan meningkatkan produktifitas pendapatan daerah melalui potensi perekonomian di Kota Blitar.

Pasar Pon Kota Blitar merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Blitar, Jawa Timur. Pasar Pon Kota Blitar juga sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Kota Blitar. Dengan adanya kebijakan revitalisasi ini jumlah pedagang terus ditingkatkan dari sisi daya tampung dan pengunjung. Pemerintah Kota Blitar mengajukan anggaran untuk pembangunan Pasar Tradisional Pon Kota

Blitar, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yaitu pedagang dan pengunjung pasar tentang pembangunan pasar. Menurut Lembaga Pengembangan Bisnis dan Investasi Daerah (LEPMIDA), mengatakan dalam kebijakan revitalisasi sebagai sarana pembangunan, Pemerintah Kota Blitar menganggarkan dana untuk program pembangunan Pasar Tradisional Pon dengan nilai pagu proyek Rp. 12 miliar berasal dari Rp. 9,5 miliar dari anggaran APBN-P Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Rp. 2,5 miliar dari anggaran APBD Kota Blitar.(beritadaerah.com)

Dengan keadaan pasar tradisional di Kota Blitar seperti diatas, maka Kota Blitar melakukan tindakan untuk merevitalisasi Pasar Pon Kota Blitar ke arah modernisasi agar mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam berbelanja di pasar tersebut dan mengoptimalkan kembali keadaan pasar. Menganut Peraturan Walikota Blitar Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikatif Kota Blitar, pasar tradisional Pon Kota Blitar dilakukan revitalisasi. Dengan adanya pemugaran Pasar Pon Kota Blitar diharapkan dapat menjadi sebuah langkah menuju perbaikan keadaan pasar yang sebelumnya banyak menimbulkan permasalahan.

Pemerintah Kota Blitar melakukan revitalisasi untuk membangkitkan dan menggerakkan eksistensi dan mempromosikan pasar tradisional dengan konsep belanja satu atap yang aman, nyaman, bersih, dan ekonomis bagi pembeli maupun pedagangnya yang dilaksanakan pada Pasar Pon Kota Blitar. Sehubungan dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional, Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan

kebijakan ini tidak hanya dilakukan pada Pasar Pon Blitar, proyek kebijakan revitalisasi juga pernah dilakukan pada Pasar Legi Kota Blitar dan Pasar Wage Kota Blitar. Program modernisasi pasar tradisional pun dinilai berjalan dengan baik. Pengelolaan, penataan dan pembinaan pasar diimplementasikan sesuai program-program kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan sarana dan prasarana yang telah diperbaharui, Pasar Legi telah menjadi pasar induk Kota Blitar dan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Blitar. Selain itu, perlu adanya bangunan yang memadai untuk kegiatan pada sebuah pasar dan serta pengelolaan yang baik dengan harapan dikelola secara profesional oleh aparaturnya Pemerintahan Kota Blitar sebagai wadah perekonomian berbasis kerakyatan dapat direalisasikan.

Kebijakan revitalisasi pasar tradisional telah dilaksanakan pemerintah serta sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memerlukan kegiatan konkrit yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam sebuah kebijakan diperlukan sebuah implementasi yang mendukung adanya pemecahan permasalahan yang terjadi di obyek kebijakan. Menurut William Dunn dalam Winarno Yoga (2002) menyatakan bahwa keputusan atas kebijakan yang diambil merupakan alternatif pemecahan masalah oleh pemerintah. Alternatif pemecahan masalah yang dilakukan perlu dilandasi indikator standardisasi pada sebuah kebijakan. Dengan standar tersebut penyelesaian masalah dapat diatasi dengan cara yang efektif.

Dalam sebuah implementasi kebijakan tidak terlepas dengan adanya sebuah hasil kebijakan. Hal tersebut mendorong adanya usaha untuk mengurangi adanya kebocoran dalam sebuah penerapan kebijakan. Hasil kebijakan memberikan gambaran pelaksanaan program dengan bentuk hubungan antar sektor-sektor

kebijakan. Hasil kebijakan juga dapat dikorelasikan dengan kinerja pelaksana dan karakteristik sesuai dengan standard prosedur kebijakan yang telah disepakati. Suatu kebijakan dapat berhasil apabila proses implementasi dapat ditransformasikan dengan tujuan dan sasaran ke dalam hasil atau kinerja kebijakan. Selanjutnya digunakan sebagai audit input dan output pelaksanaan kebijakan. Maka efisiensi dan efektifitas dalam bekerja dapat terwujud dengan sangat baik.

Implementasi kebijakan revitalisasi pada Pasar Pon Kota Blitar dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi yang berkenaan hasil yang dicapai dan jumlah usaha yang dikeluarkan. Menurut Winarno (2007:144-145) implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan yang dilakukan oleh actor, organisasi, prosedur, dan teknik kerja bersama dalam menjalankan kebijakan dalam upaya meraih hasil kebijakan sesuai tujuan dan sasaran kebijakan. Implementasi diwujudkan dengan peran aktor pelaksana kebijakan dalam memberikan dampak dan pengaruh terhadap pemenuhan tujuan kebijakan. Hasil implementasi memberikan arahan terhadap pendistribusian dalam perataan pelayanan secara adil dengan mendorong nilai-nilai sosial yang telah berkembang. Oleh karena itu kebijakan revitalisasi Pasar Pon Kota Blitar perlu diadakan sebagai bahan analisa dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu program kebijakan revitalisasi Pasar Pon Kota Blitar.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas hasil bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. Maka, penulis mengambil judul penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Pon di Kota Blitar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Pon di Kota Blitar?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Pon di Kota Blitar?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Pon di Kota Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi mengenai implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Pon di Kota Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi mengenai hasil pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Pon di Kota Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Pon di Kota Blitar.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun kontribusi dari hasil penelitian yang dilakukan dan diharapkan penulis untuk dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kontribusi Akademis**

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat sebagai wacana atau rujukan bagian akademisi, praktis, dan peminat yang menelaah implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Pon di Kota Blitar.

##### **2. Kontribusi Praktis**

a) Berkontribusi sebagai bahan diskusi dan acuan bagi akademisi, praktis, dan peminat administrasi publik, khususnya pada kajian di bidang kebijakan publik.

b) Berkontribusi memberikan sumbangan pikiran kepada para peneliti untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan di Pasar Pon Kota Blitar, maka adanya perubahan sikap para aktor di dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi di Pasar Tradisional Pon Kota Blitar.

##### **3. Kontribusi Instansi Terkait**

a) Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian dapat memberikan kontribusi wacana bagi pemerintah dan instansi terkait dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Pon Kota Blitar.

b) Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan pemerintah dan instansi terkait kebijakan ini untuk memberikan peraturan-peraturan khusus

dalam menganalisis hasil pelaksanaan kebijakan revitalisasi di Pasar Tradisional Pon Kota Blitar.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini dibuat untuk mempermudah keseluruhan hasil dari penelitian, maka penulis menyusun skripsi ini sistematis yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab kajian pustaka ini menguraikan konsep dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori utama yang digunakan mengenai kebijakan publik meliputi tahap-tahap perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, revitalisasi, dan pasar.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan pendekatan-pendekatan yang dilakukan penulis. Kemudian penulis menjelaskan jenis penelitian, fokus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan keabsahan data.

#### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil dan pembahasan menyajikan deskripsi wilayah penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyaian data dan gambaran umum lokasi penelitian. Pada nantinya penyajian data akan ditransformasikan dalam sub pembahasan.

#### BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penyajian data dan analisis pembahasan penelitian. Selain itu, saran-saran diberikan sesuai dengan data dari kesimpulan.